



# **PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**

**Oleh:**  
**Dr. Ir. Aryanto Husain, MMP**  
**(Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo)**

Dipaparkan pada Rakor Kick Off  
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo  
Rg. Dulohupa. 5 Februari 2021

# PETA PROSES BISNIS

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH

## Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Adalah **diagram** yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yg bernilai tambah bagi pemangku kepentingan

PermenPANRB No. 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

## Keterkaitan - 08

suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.

## Fungsi Silang - 07

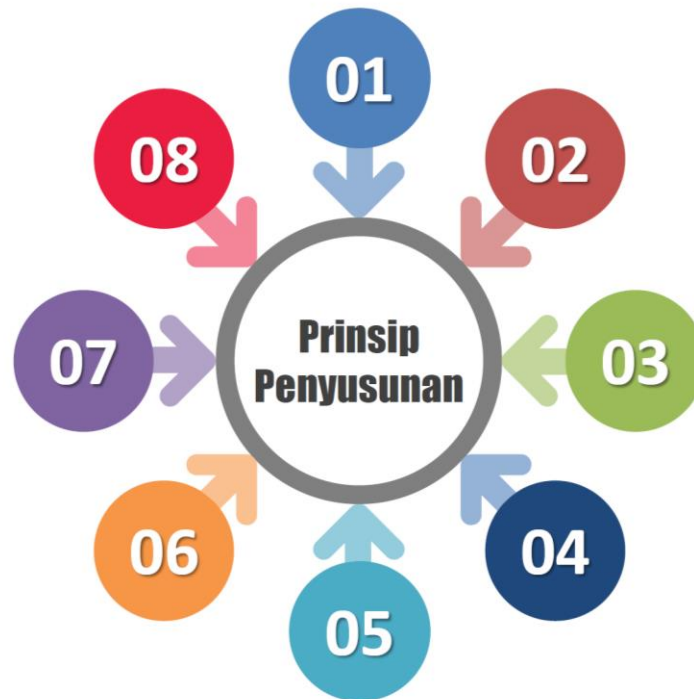
suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi.

## Sederhana Representatif - 06

mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana.

## Konsensus subjektif - 05

disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.



## 01 - Definitif

Peta probis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas

## 02 - Urutan

Peta probis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.

## 03 - Pelanggan

pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi.

## 04 - Nilai tambah

transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima.



Hasil evaluasi atas peta proses bisnis di lingkungan instansinya masing-masing wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

# LATAR BELAKANG PENTINGNYA PETA PROSES BISNIS



- ✓ Kualitas pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan publik.
- ✓ Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang tindih antara satu unit organisasi dengan unit lain
- ✓ Ego sektoral, keengganan untuk berkomunikasi, dan berkoordinasi antara satu unit organisasi dengan unit organisasi lainnya.



## MANFAAT

### Potensi Masalah

mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah



PermenPANRB 19  
Tahun 2018



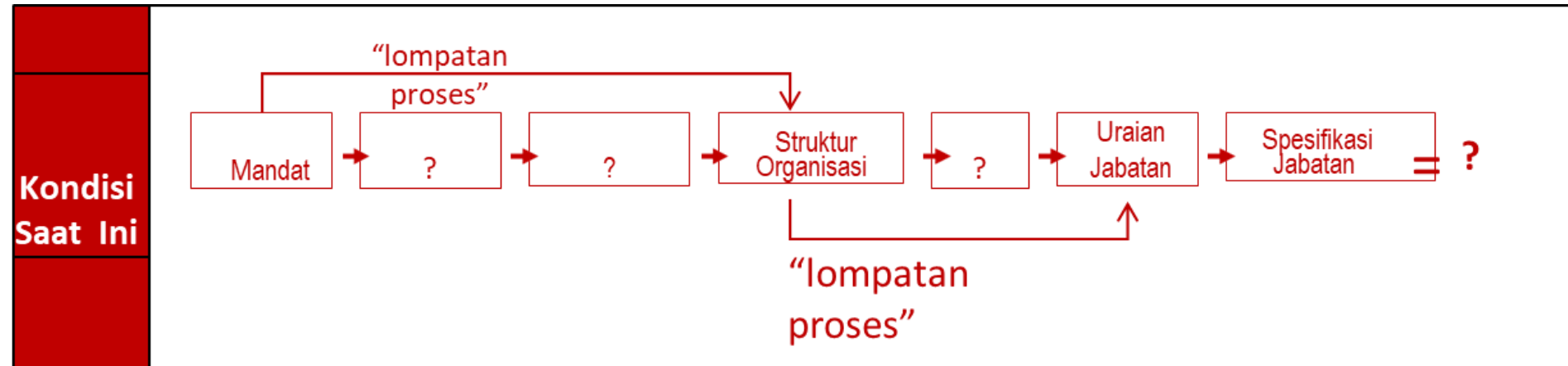
### Standar Kerja

memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan

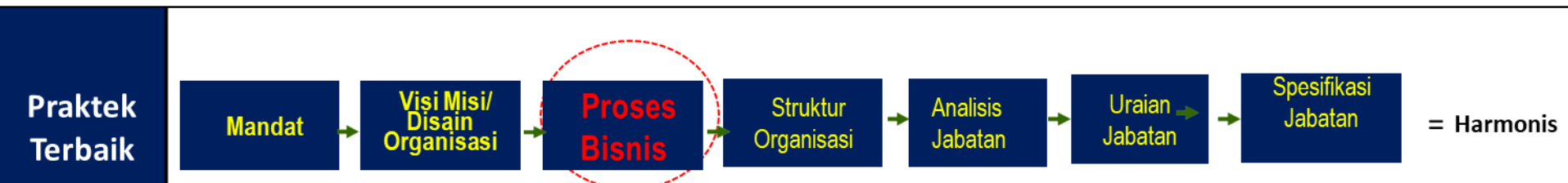




# KESELARASAN DAN KONSISTENSI UNTUK MENJAGA EFEKTIVITAS ORGANISASI



↕ Kesenjangan

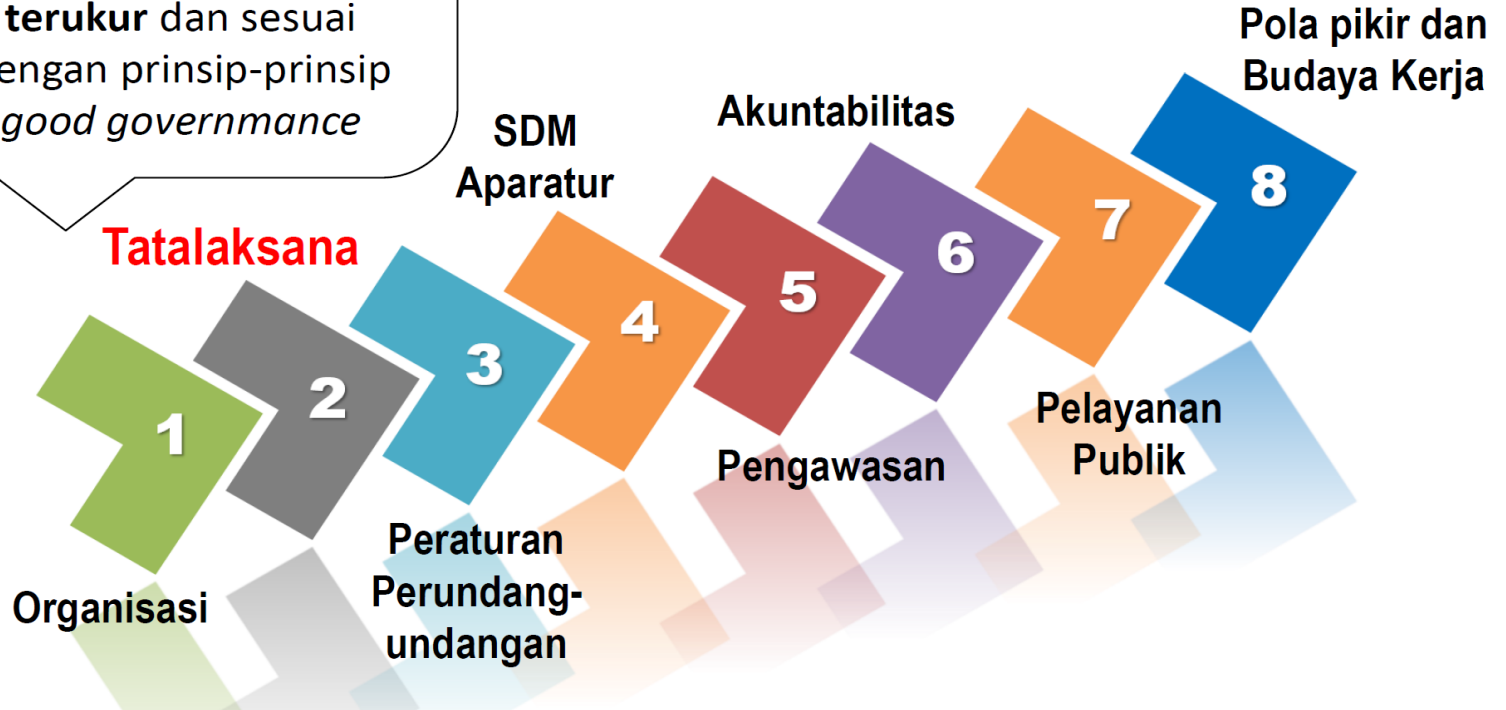


1. Adanya “**lompatan proses**” pada praktek yang dilakukan selama ini;
2. Tanpa melakukan pemetaan visi misi dan bisnis proses terlebih dahulu, cenderung menghasilkan struktur uraian jabatan yang “**regulatory minded dan seragam**”;
3. Uraian jabatan yang “**seragam**” akan menyulitkan dalam mengidentifikasi implementasi dan capaian indikator kinerja secara spesifik dan terukur;

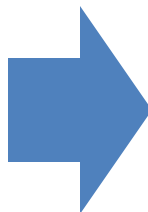
# AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

## Hasil yang diharapkan

sistem, **proses** dan prosedur kerja yang **jelas**, efektif, efisien, **terukur** dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*

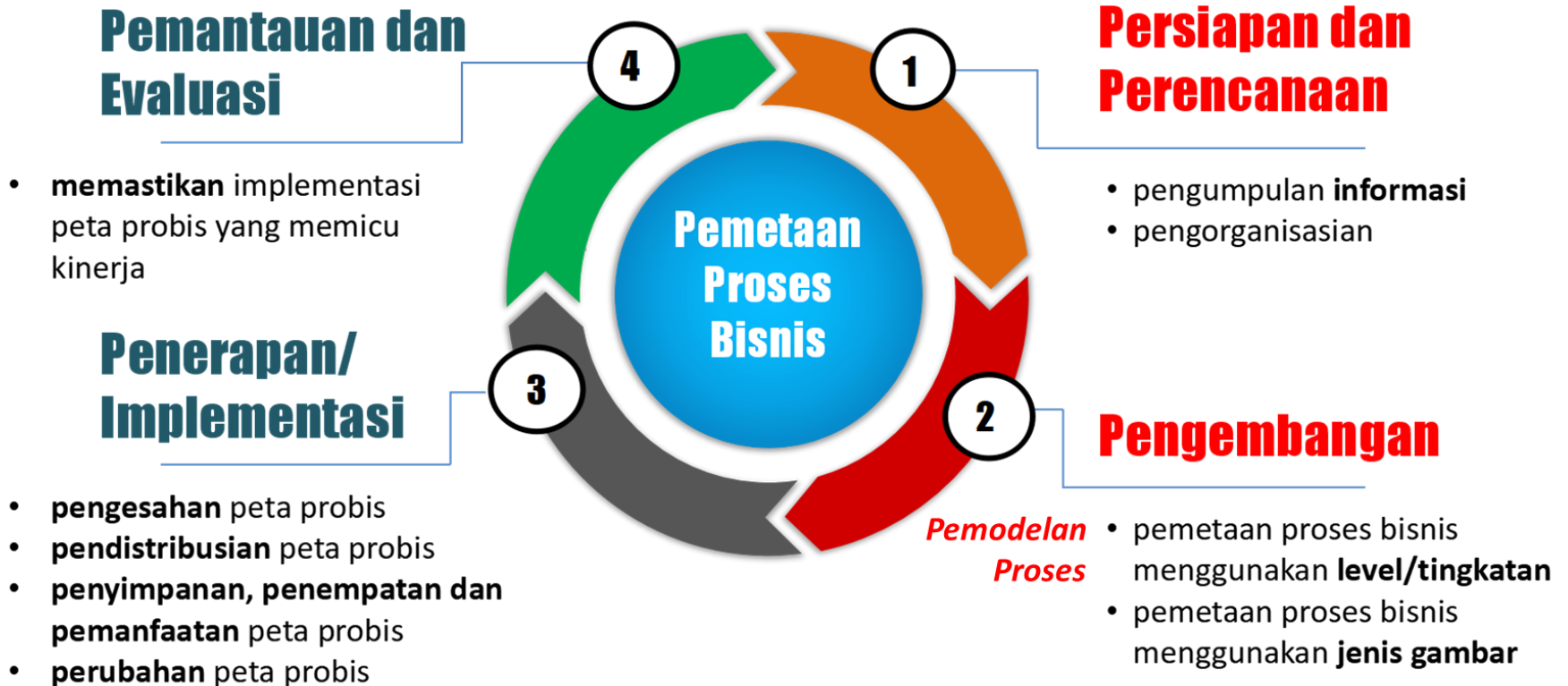


Birokrasi yang tidak efektif, tidak efisien, bertele-tele dan tumang tindih



Birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dengan pelayanan public yang berkualitas

# TAHAPAN PENYUSUNAN



# A

## Tahap Persiapan dan Perencanaan

STEP 1

### Tahap Pengumpulan Informasi

- Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer (wawancara) dan informasi sekunder (dokumen renstra, SOTK, peraturan lainnya)

STEP 2

### Tahap Pengorganisasian

- Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) masing-masing instansi pemerintah yang dipimpin oleh pimpinan instansi pemerintah
- secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana

# B

## Tahapan Pengembangan

### Kerangka peta probis menggunakan Level

#### BPMN

Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut.



Level atau tingkatan

beberapa **level atau tingkatan** (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya)

Jenis gambar peta

**jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi.**



**Peta Proses Bisnis**

#### FLOWCHART

### Kerangka peta probis menggunakan gambar

Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi



# C Tahap Penerapan

01

## Pengesahan

1. Peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan; dan
2. pimpinan instansi pemerintah menetapkan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis dengan surat keputusan.

02

## Pendistribusian

1. Pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui *hard copy* dan *soft copy*; dan
2. unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai *master file* dari sistem ketatalaksanaan organisasi.

03

## Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan

1. Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan
2. bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru

04

## Perubahan

1. Perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah;
2. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
3. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
4. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
5. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

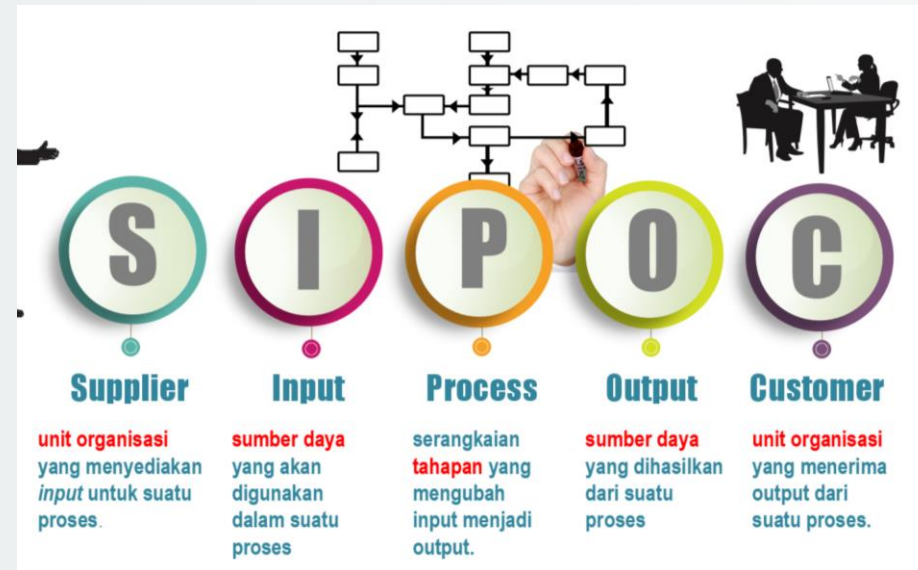
D

## Tahap Pemantauan dan Evaluasi

- Peta proses bisnis bersifat dinamis, sehingga perlu dipantau dan dievaluasi relevansi dan efektivitasnya
- Tahapan ini dilakukan paling sedikit 1 tahun sekali oleh unit kerja yang membidangi urusan tata laksana
- Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan implementasi proses bisnis instansi pemerintah
- Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kementerian PANRB

# PENGUMPULAN INFORMASI

- Pengumpulan informasi
  - Primer (melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses)
  - Sekunder (melalui dokumen rencana strategis, Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi)
- Informasi yang dibutuhkan terkait dengan *supplier*, *input*, proses, *output*, dan *customer*.
- **Teknik Analisis:**



**Analisis kausal:** telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh.

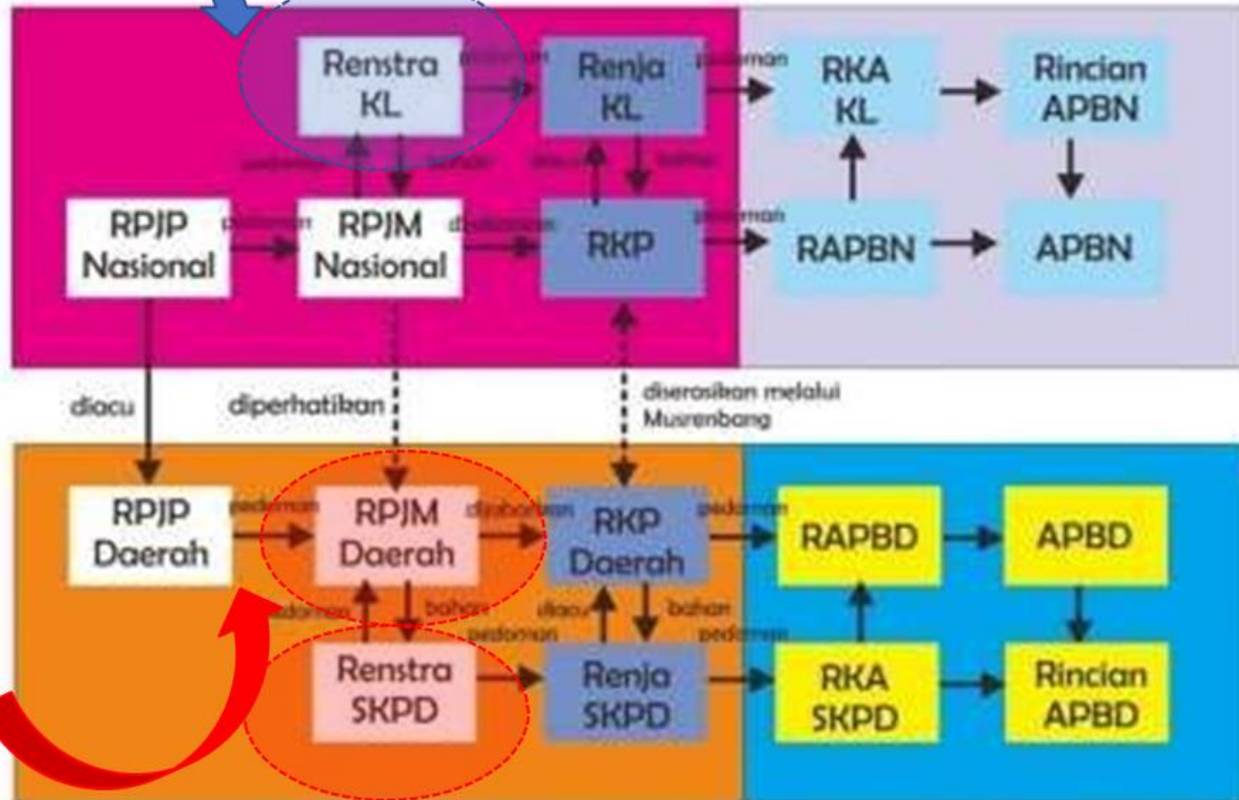
**Klasifikasi proses:** memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.

**Pemodelan proses:** pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

# IDENTIFIKASI PROSES BISNIS

Acuan  
Proses  
Bisnis  
Pusat

## DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Pemerintah  
Pusat

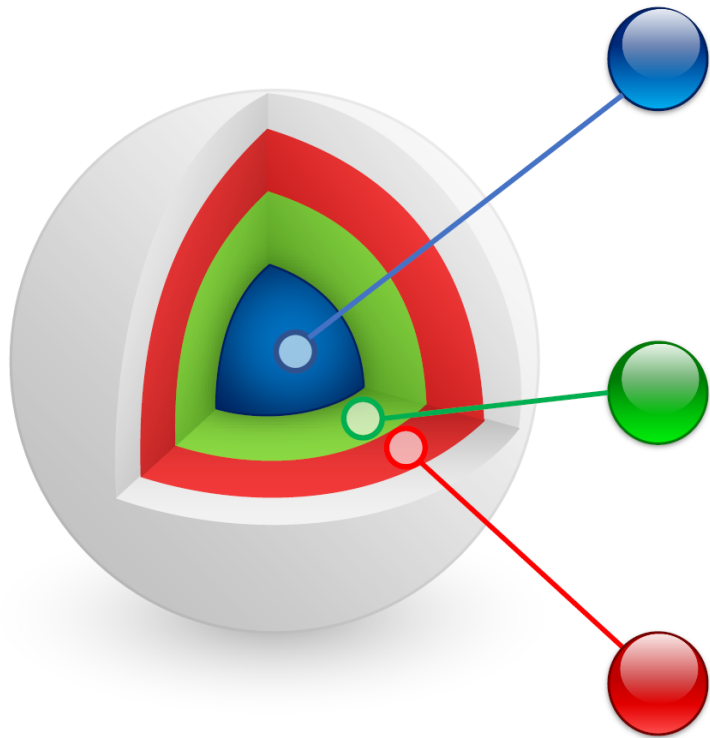
Pemerintah  
Daerah

Acuan  
Proses  
Bisnis  
Daerah

Bahan: Perda tentang Renstra dan Org. Tata Kerja



# PENGELOMPOKAN PROSES



## PROSES INTI

Proses inti merupakan proses yang menciptakan **aliran nilai utama**

- a. **Berperan langsung** dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah
- b. **Berpengaruh langsung** terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi
- c. Memberikan **respon langsung** terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna

## PROSES PENDUKUNG DAN MANAJEMEN

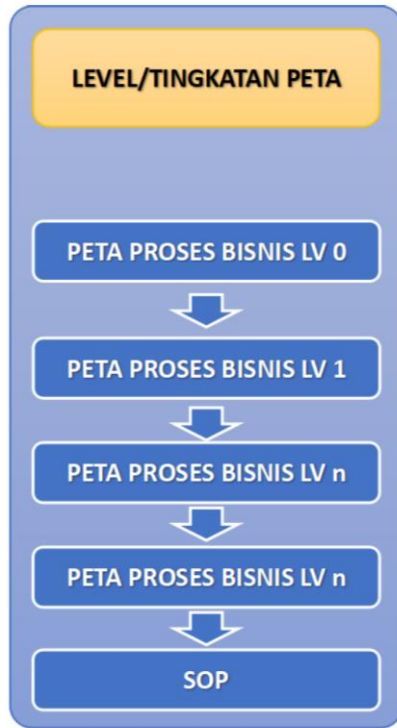
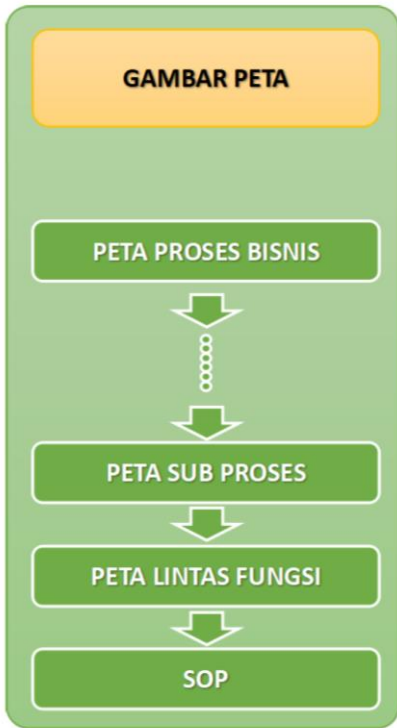
Proses pendukung adalah proses untuk mengelola **operasional** dan **manajemen** dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik.

- a. Memenuhi kebutuhan pengguna internal
- b. Memberikan **dukungan** atas aktivitas pada proses inti

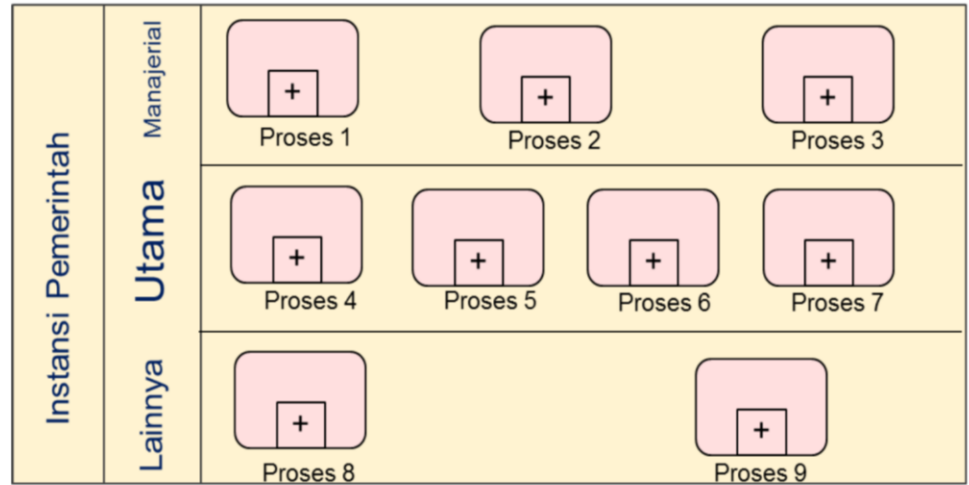
## PROSES LAINNYA

Proses lainnya adalah proses yang **tidak memiliki kaitan langsung** dengan proses inti namun menghasilkan **nilai manfaat** bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.

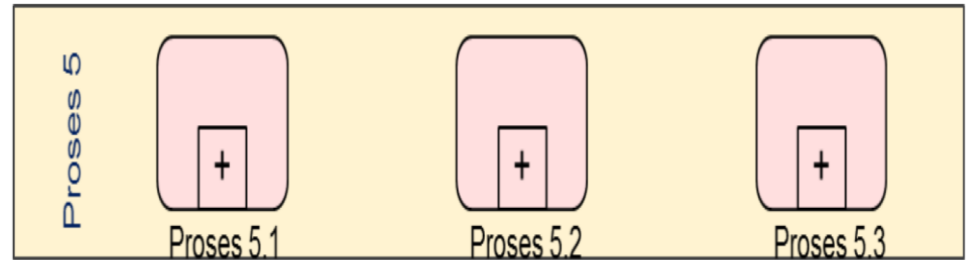
# MODEL PROSES



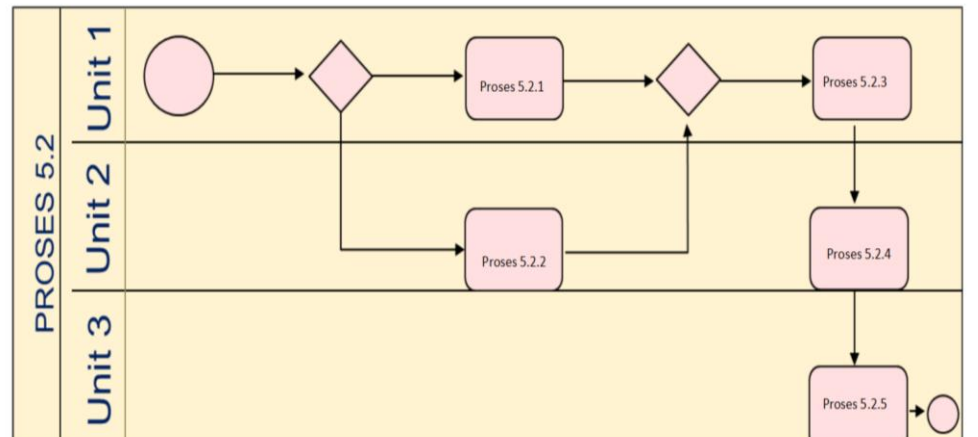
## Level 0



## Level 1



## Level 2

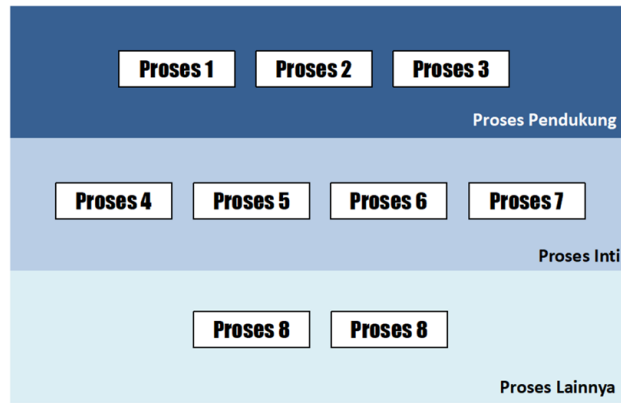




# JENIS PETA DALAM PROSES BISNIS

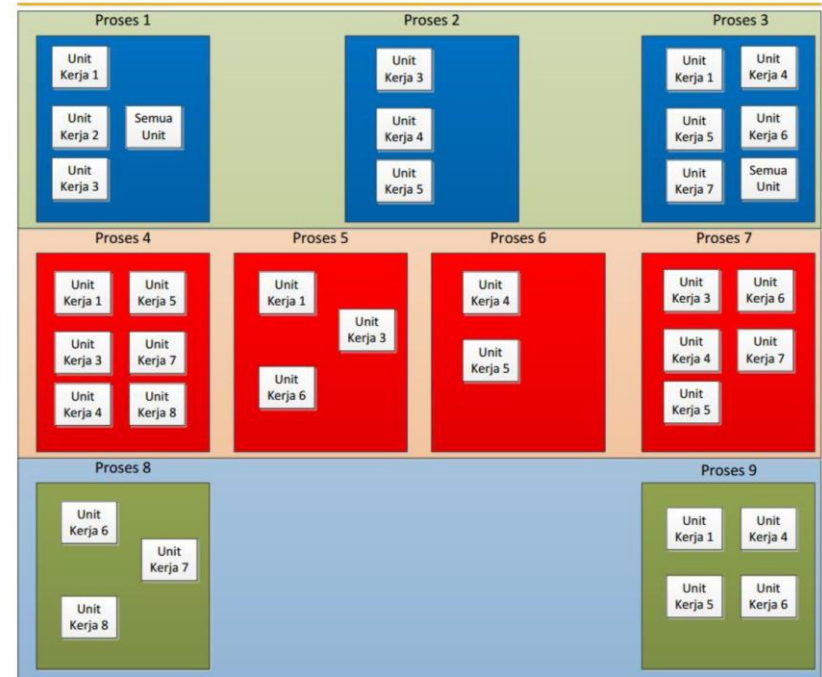
## Peta Relasi

Peta Proses



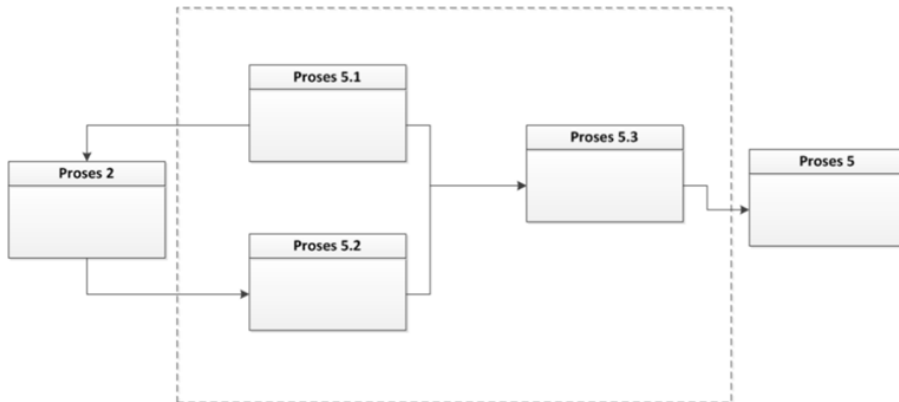
Kementerian/  
Lembaga

Kementerian/  
Lembaga

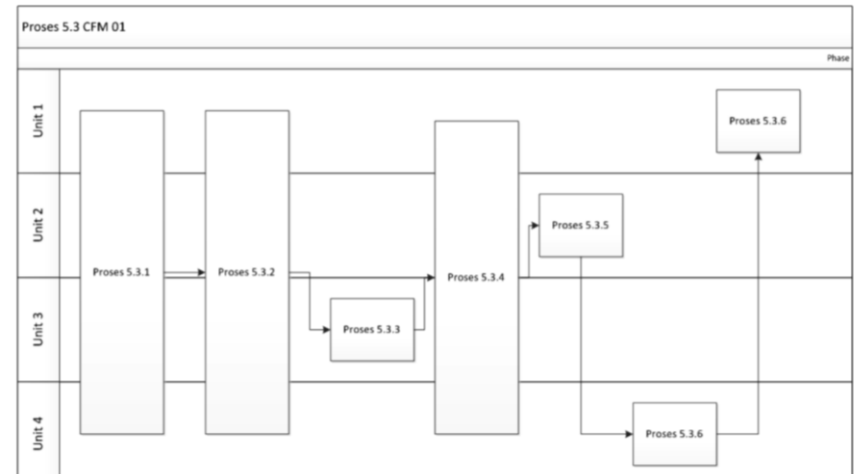


Peta Sub Proses

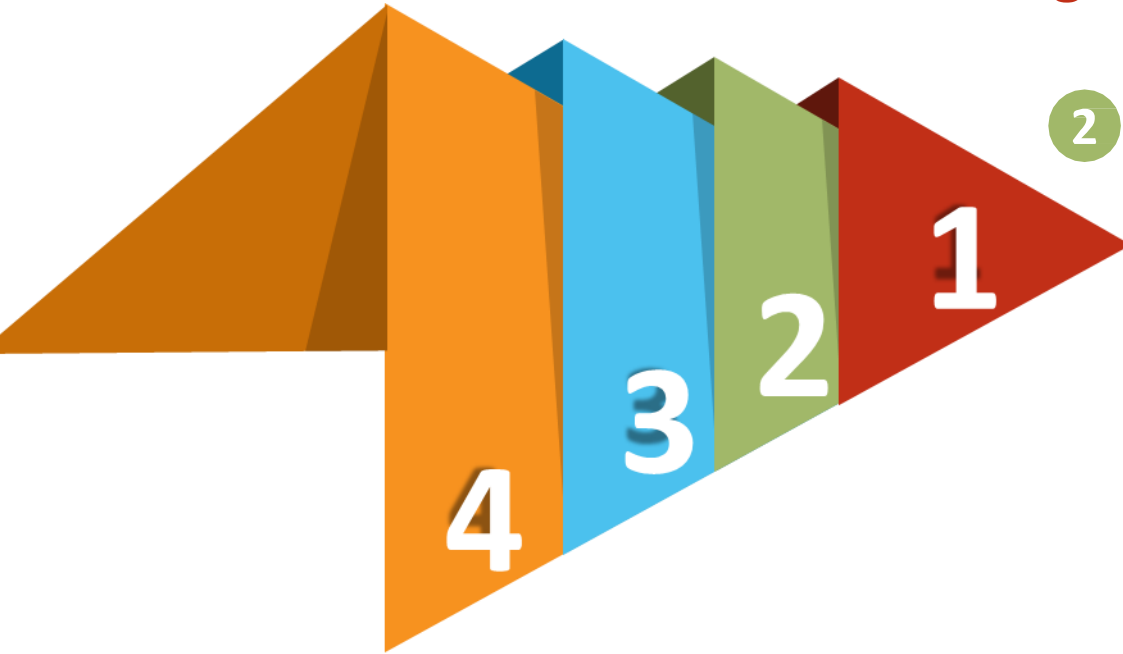
## Proses 5



Peta lintas fungsi



# LET'S DO IT...



**1** Identifikasi Visi, Misi, Tujuan Sasaran Organisasi PD

**2** Tentukan dan sepakati:

- Proses Utama
- Proses Pendukung
- Proses lainnya (bila ada)

**3** Breakdown masing-masing proses menjadi sub proses

**Buat BPMN**

**- Turunkan sub proses sampai level terkecil**

**4** Buat (Flowchart):

- Peta relasi
- Peta lintas fungsi
- SOP

## 1 Identifikasi Visi, Misi, Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

VISI	Tuliskan Visi IP
MISI	Tulisakan Misi IP
TUJUAN	Sebutkan Tujuan IP
SASARAN	Sebutkan Sasaran IP

2

Tentukan dan sepakati - Proses Utama -Proses Pendukung - Proses lainnya (bila ada)

Sebutkan sasaran

Tentukan dan sepakati **Proses Utama**

Tentukan dan sepakati **Proses Pendukung  
(Manajerial)**

Tentukan dan sepakati **Proses Lainnya**

### 3 Breakdown masing-masing proses menjadi sub proses

#### PETA PROSES

#### PETA SUB PROSES

BTL 1	Subpro 1.1
	Subpro 1.2
	Subpro 1.3
BTL 2	Subpro 2.1
	Subpro 2.2
BTL 3	Subpro 3.1
	Subpro 3.2
	Subpro 3.3
	Subpro 3.4



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA  
KEMENPAN-RB  
TAHUN 2015-2019

Contoh

Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi

MISI

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan RB
2. Menciptakan Pemerintahan yg Efektif & Efisien.
3. Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif
4. Mengembangkan Transparansi & Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

TUJUAN

Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

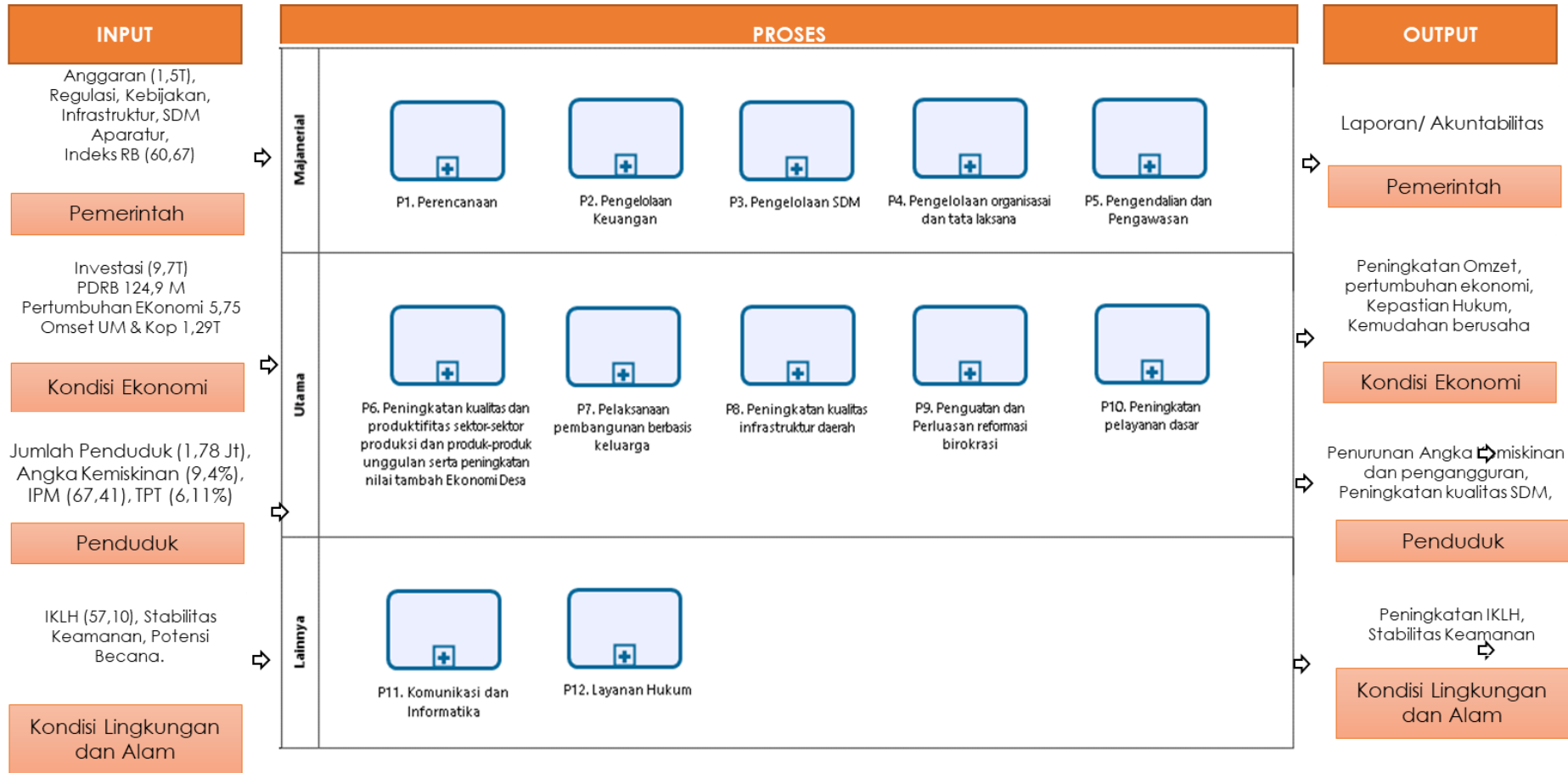
Terwujudnya SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi

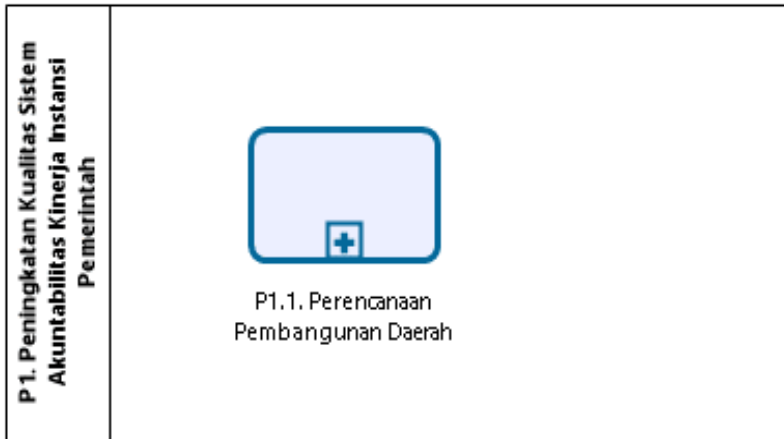
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas

Terwujudnya Aparatur Kementerian PANRB yang profesional dan berkinerja tinggi

# PROSES BISNS LEVEL 0



# Perencanaan Daerah

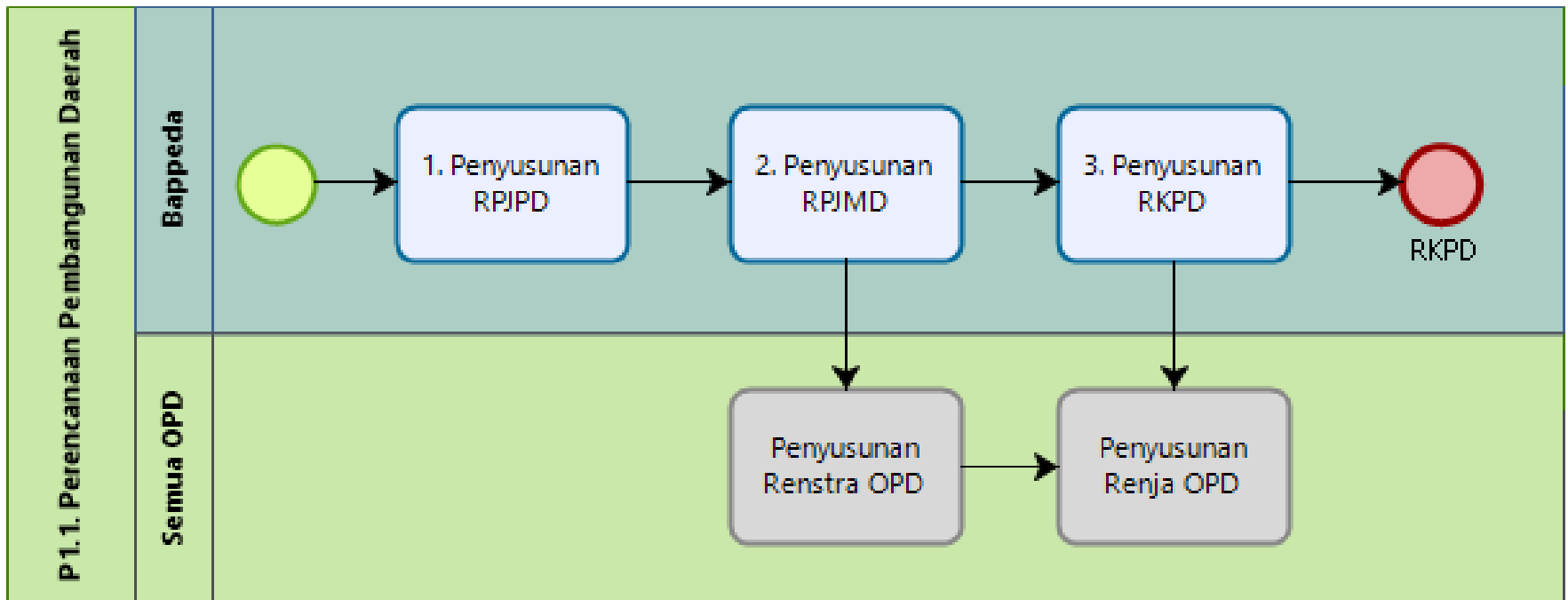


## PETA PROSES BISNIS

Perencanaan (Level 1)

## PETA LINTAS FUNGSI

Perencanaan Pembangunan Daerah (Level 2)



# PETA RELASI BISNIS

## Perencanaan

### Proses 1 Perencanaan

OPD Pelaksana

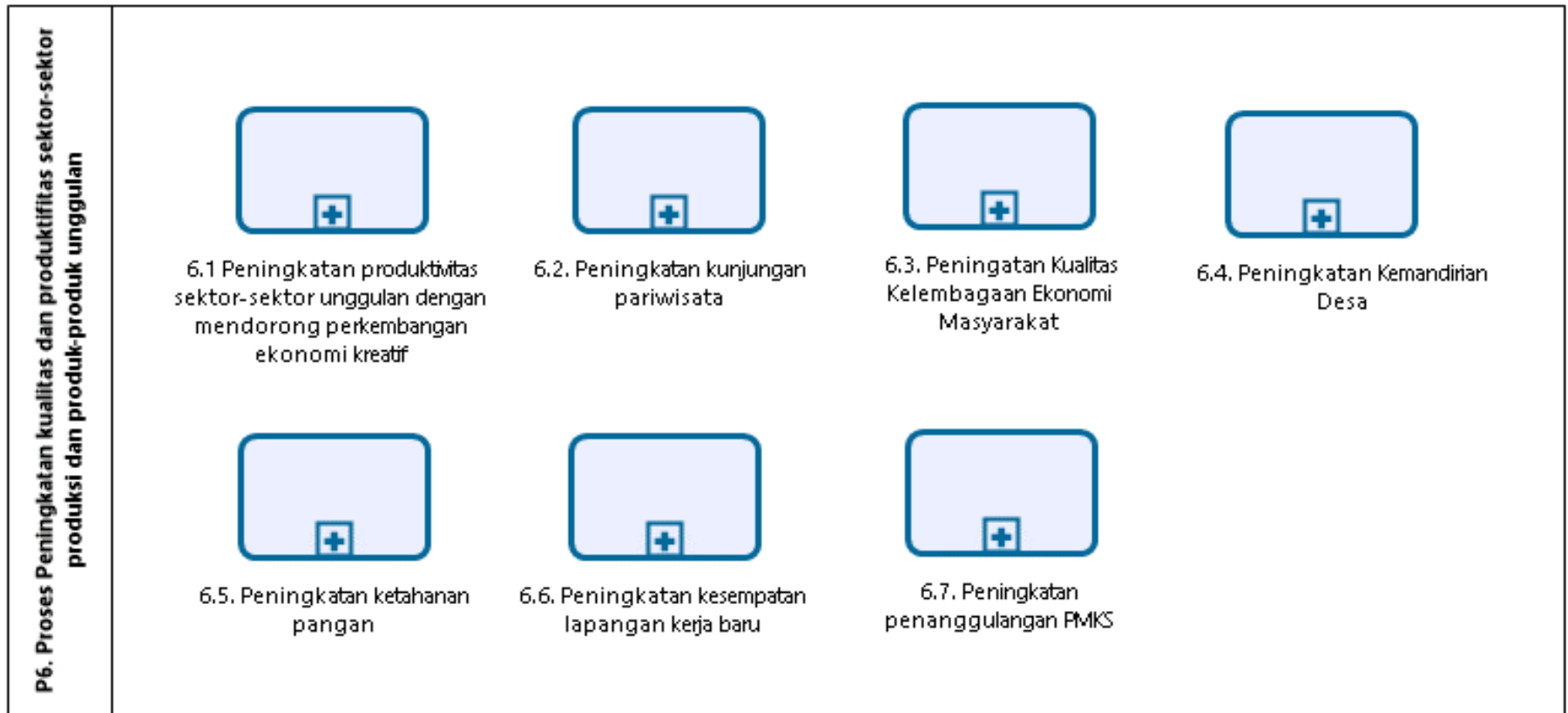
Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah

OPD Penunjang

Semua OPD

# PETA PROSES BISNIS

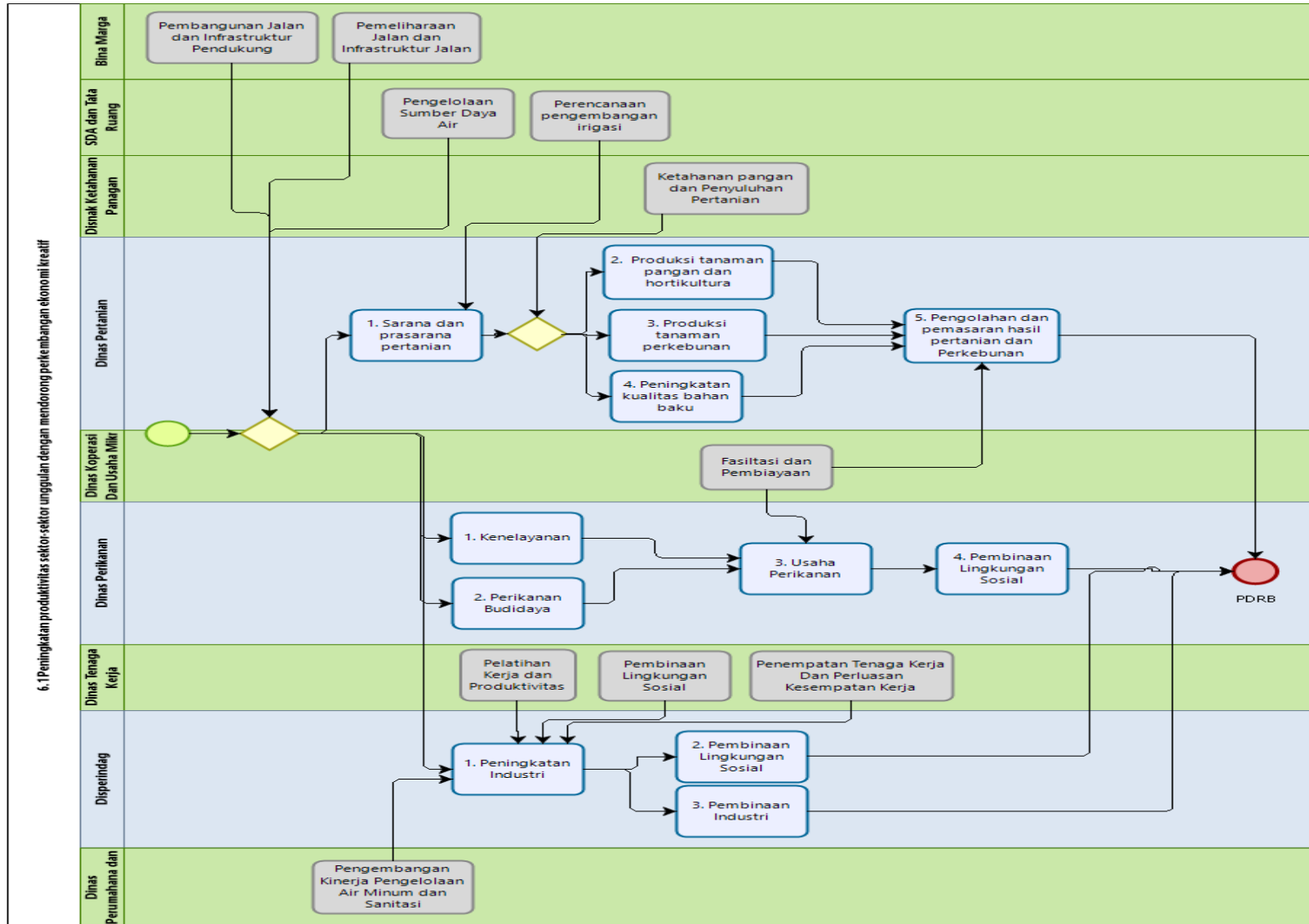
## Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Sektor-Sektor Produksi dan Produk-Produk Unggulan





# PETA LINTAS FUNGSI

## Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Sektor-Sektor Produksi dan Produk-Produk Unggulan



# PETA RELASI BISNIS

Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Sektor-Sektor Produksi dan Produk-Produk Unggulan

Proses 6 Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Sektor-Sektor Produksi Dan Produk-Produk Unggulan				
OPD Pelaksana	Dinas Pertanian	Dinas Perikanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan	Dinas Tenaga Kerja
	Dinas Sosial			
OPD Penunjang	Dinas PU Bina Marga	Dinas PU	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
	Satpol PP	Dinas Perhubungan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SETDA (Bagian Perekonomian)	Dinas Sosial	Dinas Pendidikan
	Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	SETDA (Bagian Kesejahteraan)	Dinas Kesehatan & RSUD	

# Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai

## Visi

**MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA**

## Misi

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Berwibawa
2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi Pertanian
3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah
4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas Dan Merata
5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya, Kearifan Lokal dan Agama
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah

## Tujuan

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
2. Meningkatkan Produktivitas pertanian menuju Banggai Swasembada Pangan berkelanjutan
3. Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi maritim untuk mendukung perekonomian daerah
4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan local
6. A. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia  
B. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan  
c. Mewujudkan "Desa Membangun Banggai".

Level 0

## PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

Masyarakat

BGI-01  
Peningkatan Kualitas  
Pelayanan Publik

BGI-02  
Pengembangan  
Swasembaga Pangan

BGI-03  
Pemberdayaan Potensi  
Kemaritiman

BGI-04  
Peningkatan dan  
Pemerataan Infratraktur

BGI-05  
Peningkatan Penerapan  
Nilai-nilai Agama, Kearifan  
Lokal dan Budaya

BGI-06  
Peningkatan Kualitas SDM

Masyarakat

PROSES UTAMA

Kementerian/  
Lembaga

BGI-07  
Perencanaan  
Pembangunan

BGI-08  
Pengelolaan Keuangan  
dan asset

BGI-09  
Pengelolaan SDM,  
organisasi dan tata  
laksana

BGI-10  
Pengelolaan Manajemen  
Pengawasan

BGI-11  
Pelayanan Informasi dan  
Komunikasi

BGI-12  
Layanan Hukum

Kementerian/  
Lembaga

PROSES PENDUKUNG

## LEVEL 1

BGI-08  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

	<b>BGI-08.01</b>		<b>BGI-08.02</b>
	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan		Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah

Turunkan ke peta probis level 2

## LEVEL 2

BGI-08.01  
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan

	<b>BGI-08.01CFM 01</b>
	Pengelolaan Penganggaran

Turunkan ke  
peta probis  
level 3

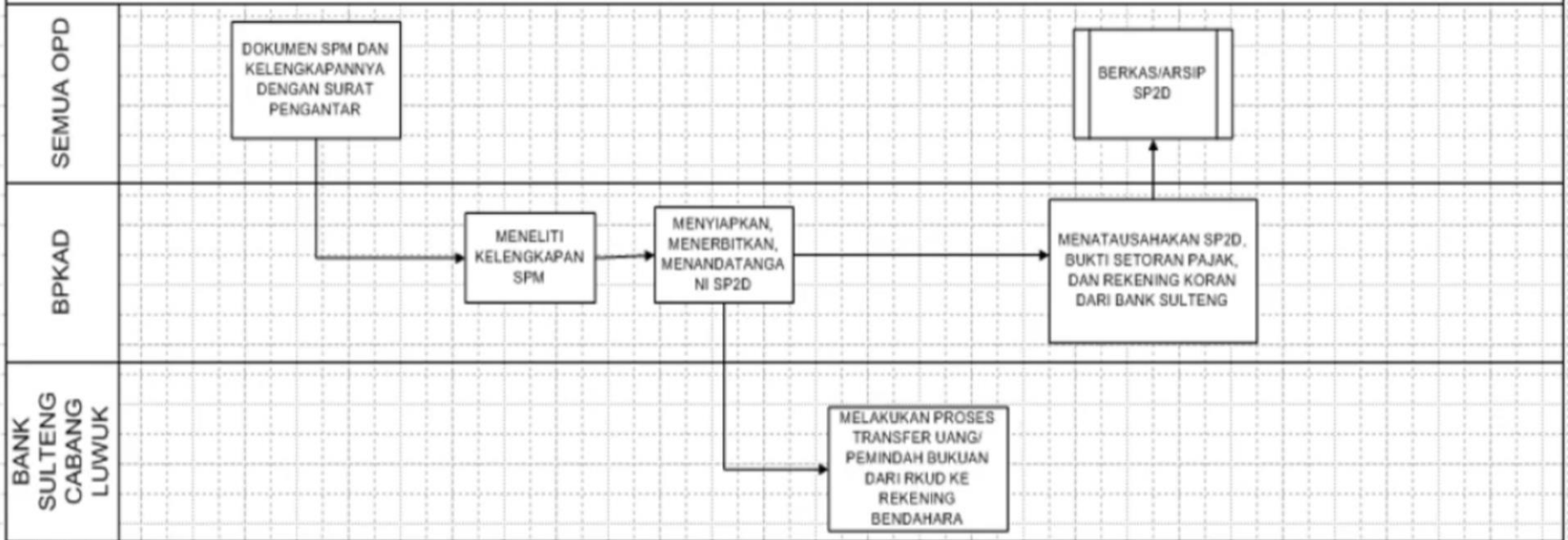
## LEVEL 3

BGI-08.01 CFM 01  
PENGELOLAAN PENGANGGARAN

<b>BGI-08.01 CFM 01.01</b> Penyusunan APBD dan PAPBD	<b>BGI-08.01 CFM 01.02</b> Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi potensi pendapatan
<b>BGI-08.01 CFM 01.03</b> Verifikasi DPA/DPPA	<b>BGI-08.01 CFM 01.04</b> Penerbitan SPD

Buat SOP dari proses  
bisnis level terkecil

BGI.08.01 CFM 01.04 PENATA USAHAAN (PENERBITAN SP2D)





# THE WAY FORWARD

- Pembentukan Tim Asistensi, berasal dari unsur terkait
- Asistensi penyusunan dokumen OPD, pendampingan bagi OPD, diskusi dilakukan dengan cara DESK (akan dibagi kemudian)
- Pemeriksaan dan identifikasi dokumen
- Finalisasi dokumen
- Pembuatan PERGUB



GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR        TAHUN 2020

TENTANG  
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS  
INSTANSI PEMERINTAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR GORONTALO,

: a. bahwa untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, perlu peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;



**TERIMA KASIH**